

# Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Kadek Prawira Wahyudi

NPP. 31.0731

Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Program Studi Keuangan Publik

Email: [prawirawahyudi23@gmail.com](mailto:prawirawahyudi23@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of lack of optimization of the use of the Regional Government Information System (SIPD) application which can affect the quality of the regional government's financial reports, Gianyar Regency, Bali Province. **Purpose:** This research aims to determine the optimization of the application of SIPD in improving the quality of local government financial reports in increasing the use of SIPD so that it can improve the quality of local government financial reporting in Gianyar Regency. **Method:** This research uses the descriptive method of Miles and Huberman theory. Data collection techniques use three methods, namely observation, interviews and documentation. The data that has been collected is analyzed according to the Miles and Huberman analysis model, which includes data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that the implementation of the SIPD application is quite optimal but there are still several obstacles such as system errors which often occur which affect financial reporting. **Conclusion:** The process of optimizing the implementation of SIPD in Gianyar Regency has not been implemented optimally, this is based on dimensions, namely the quality of the system and services which involve application trouble problems that occur during the implementation of SIPD, apart from that the lack of human resources capable of managing the system also contributes to the use of SIPD services is less than optimal, it is recommended to optimize the use of the application by implementing routine and periodic technical guidance.

**Keywords:** Information System, Report Quality, Regional Government Financial Reports

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan pemanfaatan SIPD sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif Teori Miles dan Huberman. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang telah terkumpul dianalisis sesuai model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penerapan aplikasi SIPD sudah cukup optimal namun masih ada beberapa kendala seperti sistem error yang masih kerap terjadi sehingga mempengaruhi pelaporan keuangan. **Kesimpulan:** Proses optimalisasi penerapan SIPD di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan optimal, hal ini didasarkan pada dimensi yaitu kualitas sistem dan pelayanan yang menyangkut permasalahan *trouble* aplikasi yang terjadi pada pelaksanaan dari SIPD, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola sistem tersebut turut menjadikan penggunaan pelayanan SIPD menjadi kurang optimal, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dengan pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin dan berkala

**Kata Kunci: Sistem Informasi, Kualitas Laporan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah dalam rangka mengelola keuangan daerahnya harus berdasar pada regulasi yang berlaku agar menciptakan penyelenggaraan yang berjalan tertib, disiplin, akuntabel, efektif, dan terbuka dengan berdasarkan pada asas keadilan, kebermanfaatan, kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang baik dapat dilihat dari hasil laporan keuangannya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mendapatkan predikat opini. Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah bersama dengan UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada kedua perundangan ini memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut (Marja et al., 2022) bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi pemerintahan. Anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah perlu dipertanggungjawabkan agar laporan keuangan mengacu kepada standar pengelolaan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Menurut (Halim & Muhammad, 2012)

bahwa proses pengelolaan keuangan daerah ialah segala aktivitas keuangan dengan didalamnya mencakup pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, perencanaan, pengawasan, dan termasuk pertanggungjawaban keuangan daerah. Kewenangan mengatur tata kelola keuangan daerah merupakan kewenangan pemerintah yang meliuti segala kegiatan pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, penatausahaan, perencanaan, maupun pelaksanaan yang dilaksanakan secara transparan juga sistematis kemudian tercapai hasil (*output*) laporan keuangan secara maksimal.

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwasanya asas umum tata kelola keuangan daerah yakni:

1. Keuangan daerah sebaiknya digunakan dengan taat, tertib terhadap aturan undang-undang, efektif, ekonomis, efisien, bertanggung jawab dan transparan berdasarkan pertimbangan asas kepatuhan, keadilan, dan manfaat bagi penduduk.
2. Keuangan daerah dikelola dalam pelaksanaan sistematika yang berintegrasi sehingga dihasilkan pada APBD kemudian ditetapkan oleh DPRD di setiap tahunnya.

Seluruh organisasi harus membuat laporan keuangan termasuk pemda. Adanya laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan gambaran berkaitan dengan situasi dan hasil kerja keuangan organisasi atau perangkat pemerintahan. Secara mendasar, LKPD merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas pengeluaran dana publik. Berdasarkan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menetapkan bahwasanya bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Hasil laporan keuangan melalui implementasi SAP dengan basis akrual bertujuan memberikan manfaat lebih besar apabila dilakukan perbandingan beserta tarif yang dikeluarkan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pengguna dan pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut telah selaras dengan tarif yang dikeluarkan sama dan sesuai beserta perolehan manfaatnya.

Kewenangan untuk melaksanakan tata kelola keuangan daerah dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah mampu memaksimalkan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana daerah. Satu diantara cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Berdasarkan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwasanya sistem informasi pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada pasal 31

ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwasanya Walikota/Bupati/Gubernur mengisaratkan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban dalam melaksanakan APBD terhadap DPRD yang dalam bentuk laporan keuangan dan sudah dilakukan pemeriksaan atas BPK dengan paling lambat enam bulan sesudah tahun anggaran selesai.

BPK adalah sebuah lembaga independent yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memberikan opini dan rekomendasi terhadap proses pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh lembaga negara. Menurut (Suwanda, 2013) Opini BPK dengan berangsur meliputi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berikut ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2022.

**Tabel 1**

**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2014-2022**

TAHUN	OPINI
2014	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Ikhtisar hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Gianyar

Hasil dari pemeriksaan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Gianyar berhasil mempertahankan opini BPK terhadap LKPD beserta opini WTP.

**1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yakni bahwa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki beberapa kendala diantaranya

aplikasi yang kerap loading, membuat tunjangan kesejahteraan (Tukes) dan honorarium pegawai honor/kontrak mengalami loading, Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Permasalahan yang dihadapi di lapangan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah membuat pegawai mengalami berbagai kendala seperti telatnya pencairan gaji yang berdampak pada kesulitan ekonomi yang dirasakan pegawai, terlebih lagi pegawai honor yang tak sedikit memenuhi kebutuhan hidupnya dari tukes. Permasalah penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang lambat berdampak pada kinerja pegawai salah satunya pegawai harus menunggu lama untuk melakukan penginputan data sehingga berdampak pada waktu kerja pegawai yang dituntut lembur, hal lain juga berdampak pada menurunnya kualitas kerja pegawai yang sudah barang tentu akan berpengaruh pada hasil kinerja pemerintah. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh pada kualitas pelaporan keuangan pemda Kabupaten Gianyar. Dengan melihat problematika sebelumnya, peneliti tertarik mengangkat masalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan daerah untuk kemudian peneliti teliti lebih dalam terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah guna melakukan peningkatan mutu laporan keuangan di Kabupaten Gianyar.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu peneliti merujuk kepada sejumlah penelitian terdahulu yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Rujukan ini berfungsi sebagai sumber informasi, panduan, pertimbangan, dan arahan yang membantu penulis dalam tahap penyusunan skripsi. Penelitian sebelumnya telah membantu dalam mengevaluasi pengetahuan yang telah dikembangkan. Penelitian oleh Nadya Prameswari (2021) mendeskripsikan tentang bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Perolehan Opini Audit BPK Tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga. Penelitian oleh M Zakky Harahap (2021) mendeskripsikan tentang bagaimana pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mengelola keuangan daerah dalam mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian oleh Muhammad Daffa Aldiansyah (2022) mendeskripsikan Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Kinerja Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Magelang. Penelitian oleh Cintya Infantrina (2021) mendeskripsikan tentang kesiapan penggunaan aplikasi online Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam laporan pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kota Tasik Malaya. Penelitian oleh

Ganjar Pamungkas (2022) mendeskripsikan tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitian oleh Nanda Dias (2021) mendeskripsikan tentang Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. Penelitian oleh Asma Latifa (2021) mendeskripsikan tentang Efektivitas SIPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Payakumbuh (Metode Penelitian Kualitatif). Penelitian oleh Wawan Giri Santoso (2022) mendeskripsikan tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten. Penelitian oleh Nadya Balqis dan Zuhrizal Fadhly (2021) mendeskripsikan tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. Penelitian oleh Caroline Grace Kelly (2019), mendeskripsikan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tanpa menggunakan aplikasi SIPD di Pemerintah Daerah Kota Palembang.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Nadya Prameswari, maupun lainnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) sebagai kerangka untuk mengkonseptualisasikan dan mengoperasionalkan kesuksesan sistem informasi yang dikategorikan dalam 6 kategori besar, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), dan kualitas layanan (*service quality*) yang akan berpengaruh pada penggunaan (*use*) dan kepuasan pengguna (*user satisfaction*) dan selanjutnya akan berpengaruh pada manfaat bersih (*net benefit*) yang diterima.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gianyar.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan masalah yang ditemukan berdasarkan fakta yang sifatnya khusus untuk kemudian meneliti dan menyelesaikan masalah yang sifatnya umum. Lokus penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dengan informan berjumlah 8 orang yang meliputi Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Anggaran PPKD, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Keuangan, Operator BPKAD. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi (Sugiyono, 2016). Peneliti menggunakan analisis Triangulasi Data dan Model Miles dan Huberman dalam rangka mengidentifikasi faktor yang mencakup berbagai aspek optimalisasi sistem teknologi informasi terbagi menjadi enam elemen kunci, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*) dari sistem informasi (Jogiyanto, 2007). Data yang dipilih akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data ini akan diolah menjadi kesimpulan dengan pemahaman yang komprehensif tentang situasi yang sebenarnya di lapangan, termasuk aspek waktu dan kondisi yang terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis melalui model evaluasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini menilai optimalisasi sistem teknologi informasi berdasarkan enam elemen kunci. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1 Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

#### 3.1.1 Kualitas Sistem

Menurut (Jogiyanto, 2007) mendefinisikan kualitas sistem sebagai kinerja sistem yang merujuk pada sejauh mana keandalan dari sistem komputer, waktu respon *on-line* dan kemudahan menggunakan terminal dari sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar, kualitas sistem yang digunakan telah berjalan dengan efektif, terutama dalam hal aplikasi SIPD yang sangat mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Meskipun aplikasi tersebut masih

memiliki beberapa kelemahan, secara umum, kualitas sistem yang ada dan hasil yang dihasilkan sudah cukup memuaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bidang Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar di ruang kerja beliau adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar banyak adanya positif dan negatif dalam penggunaannya, dalam hal ini kualitas dari suatu sistem terutama aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia yang ada, aplikasi tersebut merupakan aplikasi satu pintu di seluruh Indonesia, jadi jika kualitas dari sistem sendiri masih belum memadai maka akan mempengaruhi berbagai macam hal”.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah suatu terobosan inovasi yang di dalamnya mencakup informasi keuangan disetiap daerah, jika dalam pengelolaan aplikasinya masih belum maksimal maka bisa menjadi suatu permasalahan baru bagi kita karena jika masih belum siap untuk digunakan maka bisa menjadi suatu masalah baru. Seperti contoh baru awal tahun 2024 ini sistem sempat mengalami *error* dimana Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Kabupaten Tabanan yang masuk pada sistem Kabupaten Gianyar, hal ini tentu dapat mengganggu dari pelaporan keuangan itu sendiri”.

Kualitas Sistem yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terutama dalam informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah mampu menunjang dan sangat membantu kinerja OPD, namun sebaliknya juga dapat menjadi permasalahan baru apabila pegawai tidak teliti dalam penggunaan *system* yang bisa saja terjadi *error* secara tiba-tiba.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem sangatlah penting dan bisa disebut sebagai hal yang riskan, karena aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang mencakup mengenai berbagai informasi pemerintahan. Kualitas Sistem yang ada dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terutama dalam informasi keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah mampu menunjang dan sangat membantu kinerja OPD, namun sebaliknya juga dapat menjadi permasalahan baru apabila pegawai tidak teliti dalam penggunaan *system* yang bisa saja terjadi *error* secara tiba-tiba.



### 3.1.2 Kualitas Informasi

Menurut (James, 2005) Kualitas informasi merujuk pada sejauh mana informasi memiliki atribut konten, format, dan waktu yang memberikan nilai bagi pengguna akhir tertentu<sup>1</sup>. Kemudian menurut DeLone dan McLean dalam (Jogiyanto, 2007) Keberhasilan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi. Kualitas informasi dapat memiliki efek yang signifikan pada individu. Kualitas informasi dapat memiliki efek yang signifikan pada individu. Efek positif yang diharapkan mencakup peningkatan kemampuan memutuskan, menghematkan waktu, dan meningkatkan kualitas kerja yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi (Jogiyanto, 2007).

Menurut (Jogiyanto, 2007), kualitas sangat dipengaruhi oleh delapan hal, yaitu:

1. Kepuasan Pemakai (*user satisfaction*): Kepuasan pemakai terkait informasi yang disediakan sehingga mempengaruhi kualitas informasi yang digunakan
2. Akurasi Informasi (*information accuracy*): Informasi harus bebas dari kesalahan dan jelas dalam maksudnya. Ketidakakuratan bisa terjadi karena gangguan pada sumber informasi atau manipulasi yang merusak atau mengubah data asli.
3. Ketepatan Waktu (*timeliness*): Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus disajikan dengan cepat. Informasi yang terlambat memiliki nilai yang rendah, dan jika digunakan untuk pengambilan keputusan, dapat memiliki dampak yang serius. Karena itu, kecepatan dalam memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi memerlukan teknologi terkini.
4. Keandalan (*reliability*): Menjelaskan bagaimana tingkat keandalan informasi dalam menyajikan suatu informasi guna menciptakan kualitas informasi yang dapat diandalkan.
5. Kelengkapan (*completeness*): Bagaimana tingkat kelengkapan informasi yang disajikan mampu memberikan informasi yang lengkap dan tepat guna.
6. Relevan (*relevancy*): Informasi perlu memberikan manfaat yang relevan bagi pengguna. Tingkat relevansi informasi dapat bervariasi tergantung pada setiap pengguna.
7. Ketepatan (*precision*): Tingkat ketepatan informasi dalam memberikan layanan kualitas informasi yang presisi dan tepat guna.

---

<sup>1</sup> O'Brien, James A. 2005. Introduction to Information System, 12th Edition. McGraw. (IJMRME), p. 42-48.

8. Kekinian (*currency*): Bagaimana informasi yang disajikan dalam layanan informasi yang sesuai dengan keadaan terkini.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Sub Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Gianyar baru mulai memasuki tahap penatausahaan. Pengelolaan keuangan yang digunakan dalam aplikasi SIPD yaitu tahap perencanaan, penganggaran yang sudah dapat diterapkan dengan baik. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara keseluruhan kami dibantu dengan aplikasi SIMDA-NG yang dapat menghasilkan laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar”.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Keuangan BPKAD Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Aplikasi SIPD masih dalam tahapan penatausahaan. Aplikasi SIPD belum sampai pada tahap pelaporan sehingga BPKAD Kabupaten Gianyar memerlukan aplikasi lain untuk pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar, yaitu dengan menggunakan aplikasi *Generation* (SIMDA-NG)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali belum mencapai sasaran dan tujuan dalam tahap pelaporan keuangan. Dengan aplikasi SIPD yang belum dapat digunakan dalam tahap pelaporan keuangan, BPKAD Kabupaten Gianyar masih menggunakan aplikasi lain yaitu SIMDA-NG untuk melakukan tahapan pelaporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SIPD belum efektif sebagai aspek kualitas informasi dan dalam penerapannya untuk mencapai sasaran laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Gianyar.

### 3.1.3 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai standar yang mendorong pengguna sistem atau aplikasi. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, salah satu cara dengan melihat persepsi dari sudut pandang yang berbeda dalam artian lain melakukan perbandingan persepsi pengguna sistem terhadap pelayanan yang diterima dengan harapan atau preferensi yang sebenarnya terkait dengan atribut-atribut yang ada.

Kualitas pelayanan mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen. Pelayanan dalam hal ini merujuk pada layanan yang diberikan oleh penyedia layanan, yang meliputi kecepatan, kemudahan, kemampuan, hubungan, dan keramahan dalam memberikan pelayanan demi kepuasan pelanggan.

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap pelayanan yang sebenarnya mereka terima. Menurut (Jogiyanto, 2007), terdapat lima komponen yang berpengaruh pada kualitas pelayanan yaitu:

1. Berwujud (*tangible*): Seperti misalnya sistem informasi mempunyai perangkat keras dan perangkat lunak.
2. Keandalan (*reliability*): Seperti misalnya sistem informasi dapat diandalkan.
3. Kesegaran (*responsiveness*): Seperti misalnya karyawan-karyawan sistem informasi memberikan pelayanan segera kepada pemakai-pemakai.
4. Jaminan (*assurance*): Seperti misalnya karyawan-karyawan sistem informasi mempunyai pengetahuan untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
5. Empati (*emphaty*): misalnya sistem informasi mempunyai kepentingan terbaik di hati pemakai.

Di Kabupaten Gianyar sendiri terutama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditinjau dari sisi pelayanan dinilai masih memiliki keterbatasan, berdasarkan tinjauan aspek inilah menjadikan sebagai kelemahan dari sistem pelayanan hal ini dikarenakan tidak semua bisa menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Kualitas pelayanan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan mendapatkan pengalaman yang positif, mereka lebih cenderung menjadi pelanggan setia. Sebaliknya, pelayanan yang buruk atau mengecewakan dapat menyebabkan pelanggan kehilangan loyalitasnya.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pengguna Akun di BPKAD Kabupaten Gianyar Tahun 2024**

NO	JABATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris Badan	1
3.	Kabid Perencanaan dan Keuangan	1
4.	Kasubbid Pelaporan dan Akuntansi	1
5.	Staf	7

Sumber: Website BPKAD Kabupaten Gianyar, 2024

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwasannya user atau admin dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar berjumlah 11 orang. Dari data tersebut juga dapat disajikan bahwa pengelola layanan dari aplikasi tersebut juga sangat terbatas, namun jenis pelayanan yang diberikan juga harus optimal karena dari pelayananlah berbagai informasi yang disajikan dapat akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa:

“Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sendiri admin ataupun usernya juga sangat terbatas, hal itulah yang masih menjadi bahan evaluasi kami dikarenakan ini mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Dalam pelaksanaan pelayanan di aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah juga adanya keterbatasan dikarenakan tidak semua orang mampu menguasai terkait sistem ataupun aplikasi”.

Dalam hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sendiri mampu untuk menghasilkan informasi yang akurat, namun dari segi pelayanan juga dirasa kurang memadai sebab hanya 7 orang admin yang paham dan mampu mengelola semua informasi dan data yang ada di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

### 3.1.4 Intensitas Pengguna

Pemakaian dan kepuasan pengguna saling terkait erat. Pemakaian sistem harus terjadi sebelum kepuasan pengguna dapat tercapai sebagai suatu proses, tetapi pengalaman baik dalam penggunaan akan terjadinya peningkatan kepuasan pengguna sebagai akibatnya. Secara bersama-sama, peningkatan kepuasan pengguna akan menghasilkan peningkatan minat untuk menggunakan sistem dan akhirnya penggunaan yang lebih aktif.

Pengukuran intensitas pengguna dapat dilihat dari dua aspek yaitu penggunaan (*actual use*) nyata dan penggunaan dilaporkan (*reported use*) (Jogiyanto, 2007). Intensitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja individu pengguna. Begitu pula, pengaruh individu tersebut berdampak pada kinerja organisasi secara signifikan.

Dalam penggunaan aplikasi SIPD, intensitas penggunaan juga menjadi faktor penting. Selama magang dan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar, peneliti juga memperhatikan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sangat intensif. Terbukti dari proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar menjadi lebih efisien karena informasi dari Organisasi Perangkat Daerah tersedia secara terpusat, memudahkan pengguna untuk melakukan pengecekan secara berkala.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Pengguna aplikasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah hanya terbatas jadi itu merupakan kendala yang dialami di suatu Organisasi Pemerintahan Daerah. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah juga harus sangat teliti dikarenakan tidak semua orang mampu menguasai sistem tersebut”.

Dalam hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya penggunaan dari aplikasi sudah berjalan maksimal sesuai dengan intensitas waktu karena dalam penyusunan laporan keuangan sangat dibutuhkan terlebih untuk melaksanakan pengecekan bertahap, namun ada beberapa hal yang harus dievaluasi karena seiring berjalannya waktu juga zaman akan terus berkembang, permasalahannya ialah sumber daya manusia yang meng operasikannya masih belum menguasai semua, karena beberapa faktor terutama gagap teknologi.

### **3.1.5 Kepuasan Pengguna**

Dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Menurut (Jogiyanto, 2007) untuk mencapai pelaporan keuangan yang berkualitas, kepuasan pengguna berhubungan erat dengan sikap (*attitude*) yang menjadi salah satu faktor penting. Hal ini karena kepuasan pengguna merupakan faktor pendukung yang memungkinkan administrator dan pengguna sistem dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan mencapai kepuasan yang maksimal. Pengguna atau pihak yang dapat mengakses Sistem Informasi Pemerintahan hanyalah beberapa orang. Namun pendapat dari pengguna aplikasi tersebut menyampaikan bukti kepuasan terhadap layanan yang diberikan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar menyatakan bahwa:

“Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sudah terhitung berjalan efektif 5 Tahun, Dalam hal ini juga adanya kepuasan dalam mengakses informasi maupun input data yang dibutuhkan jadi dengan demikian ini merupakan faktor yang sangat penting karena mempengaruhi kinerja dari pegawai tersebut”.

Hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwasannya pihak pengguna merasa puas terhadap apa yang mereka kelola, dari segi faktor kualitas sistem ataupun informasi juga sangat mempengaruhi untuk membantu penyusunan pelaporan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Gianyar.

### **3.1.6 Manfaat Bersih**

Manfaat bersih merujuk pada dampak keberadaan dan penggunaan sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna, baik secara individu maupun organisasi. Manfaat bersih ini mencakup manfaat akses informasi, manfaat kualitas informasi dan manfaat keluwesan informasi. (Jogiyanto, 2007) menyatakan bahwa dampak informasi tidak hanya terbatas pada pengguna individu dan organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok pengguna, antar organisasi, konsumen, pemasok, aspek sosial, dan bahkan negara.

Untuk menjaga kesederhanaan model, (Jogiyanto, 2007) mengusulkan untuk menggabungkan dampak individu dan dampak organisasional menjadi satu variabel tunggal yang disebut manfaat bersih (*net benefits*). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menjaga kesederhanaan model. Dampak sistem informasi tidak hanya terbatas pada pengguna individu dan organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok pengguna, antar organisasi, konsumen, kontraktor, aspek sosial, dan bahkan negara. (Jogiyanto, 2007) mengusulkan untuk menyebutnya sebagai manfaat bersih (*net benefits*).

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Teknologi menyatakan bahwa:

“Semenjak adanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mampu memberikan manfaat dan menjadikan pekerjaan menjadi efisien, karena melalui aplikasi tersebut mampu menciptakan pelayanan satu pintu lalu terlebih juga mempermudah pera pengguna untuk akses data yang diperlukan, dan mempermudah pekerjaan karena fitur yang ada didalamnya mampu meningkatkan kualitas pekerjaan terlebih kualitas laporan keuangan yang ada di Kabupaten Gianyar karena dapat di akses dengan mudah dan transparansi”.

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mampu memberikan manfaat yang banyak terlebih terhadap informasi keuangan daerah dan mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Gianyar.

### **3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar**

Faktor penghambat tersebut merupakan serangkaian kondisi-kondisi ataupun elemen yang dapat memberikan kontribusi negatif (mempersulit) terhadap implementasi pada suatu program, kegiatan dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut faktor penghambat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gianyar

#### **1. Faktor penghambat internal**

Faktor penghambat internal dalam proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini utamanya dapat dikaitkan dengan SDM. Dimana pemahaman dari pegawai yang masih kurang dalam hal penggunaan teknologi dan pengetahuan tentang aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga dapat menyebabkan pegawai mengalami kesulitan beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada.

#### **2. Faktor penghambat eksternal**

Faktor penghambat eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini yakni lambatnya komunikasi pihak pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada admin di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dari penatausahaan yang masih belum optimal sehingga masih banyak kekeliruan dari sistem.

### **3.3 Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah**

Upaya merupakan tindakan atau aktivitas yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan konteks yang lebih luas, upaya dapat mencakup berbagai jenis tindakan, strategi, atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi suatu masalah, memperbaiki kondisi, atau mencapai hasil yang diinginkan.

#### **1. Upaya Langsung**

Upaya langsung merupakan tindakan atau aktivitas yang diambil secara langsung untuk mencapai tujuan atau menangani masalah. Ini berarti tindakan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap situasi atau kondisi yang ingin diubah atau diperbaiki.

a. Upaya Langsung Internal

Upaya langsung internal yang dilakukan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

b. Upaya Langsung Eksternal

Upaya langsung eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yakni dapat melakukan koordinasi dengan Kemendagri, Provinsi dan daerah-daerah lainnya secara langsung. Hal ini dilakukan agar bisa menciptakan sebuah sinergi yang baik dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada untuk mendapatkan tindak lanjut saat penerapan telah dilakukan

2. Upaya Tidak Langsung

Upaya tidak langsung merupakan tindakan atau aktivitas yang tidak memiliki dampak langsung atau konkret terhadap situasi atau kondisi yang ingin diubah atau diperbaiki.

a. Upaya Tidak Langsung Internal

Upaya tidak langsung dalam meningkatkan kualitas pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Upaya tersebut dapat mencakup penggunaan modul-modul yang tersedia, seperti modul baru, modul penatausahaan, dan modul akuntansi laporan, dengan harapan agar dapat mengatasi berbagai hambatan. Selain itu, terdapat upaya tidak langsung internal dalam mendorong penggunaan SIPD secara menyeluruh dalam semua transaksi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan.

b. Upaya Tidak Langsung Eksternal

Upaya tidak langsung yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang secara khusus mengarah pada kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, terdapat upaya untuk melakukan koordinasi eksternal dengan Pusdatin dan Kemendagri, dengan saran untuk membentuk sebuah tim khusus yang terdiri dari beragam ahli teknis dan perwakilan dari pemerintah pusat.



### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat faktor penghambat eksternal dan internal. bahwa faktor penghambat eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini yakni lambatnya komunikasi pihak pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada admin di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Muhammad Daffa Aldiansyah (2023) yang menyebutkan bahwa saat ingin mendiskusikan kendala Sistem Informasi Pemerintahan Daerah cukup sulit mendapatkan respon dari pusat mengingat program ini dilakukan seluruh Indonesia sehingga mendapatkan solusi atau arahan dari pusat menjadi sulit. Dimana respon terkait permasalahan yang dihadapi tidak dapat dengan segera. Kemudian dari penatausahaan yang masih belum optimal sehingga masih banyak kekeliruan dari sistem.

Terdapat juga faktor penghambat internal dalam proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini utamanya dapat dikaitkan dengan SDM. Dimana pemahaman dari pegawai yang masih kurang dalam hal penggunaan teknologi dan pengetahuan tentang aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga dapat menyebabkan pegawai mengalami kesulitan beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang ada. Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad Zaky Harahap (2021) yang menyebutkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi yang mampu mengoperasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih terbatas sehingga pengoperasiannya tidak maksimal. Kemudian, dari aspek koordinasi antara bendahara dengan admin atau user juga masih kurang.

## IV. KESIMPULAN

Hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi dapat ditentukan melalui berbagai aspek, salah satunya adalah melalui model evaluasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean. Model ini menilai optimalisasi sistem teknologi informasi berdasarkan enam elemen kunci, yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan

(*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*) dari sistem informasi

Proses optimalisasi penerapan Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan optimal, hal ini didasarkan pada dimensi yaitu kualitas sistem dan pelayanan yang menyangkut permasalahan *trouble* aplikasi yang terjadi pada pelaksanaan dari SIPD, selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu untuk mengelola sistem tersebut turut menjadikan penggunaan pelayanan SIPD menjadi kurang optimal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terdapat faktor penghambat internal dalam proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini utamanya dapat dikaitkan dengan SDM. Dimana pemahaman dari pegawai yang masih kurang dalam hal penggunaan teknologi dan pengetahuan tentang aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian faktor penghambat eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini yakni lambatnya komunikasi pihak pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada admin di Kementerian Dalam Negeri.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan Upaya tidak langsung maupaun upaya langsung dalam meningkatkan kualitas pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Upaya tidak langsung tersebut dapat mencakup penggunaan modul-modul yang tersedia, seperti modul baru, modul penatausahaan, dan modul akuntansi laporan, sedangkan upaya tidak langsung yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan eksternal dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang secara khusus mengarah pada kolaborasi dan koordinasi yang intensif dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan untuk penelitian berikutnya terkait penerapan aplikasi SIPD dalam meningkatkan pelaporan keuangan agar dapat terlaksana lebih optimal dan lebih baik. Peneliti lain lebih lanjut juga dapat menganalisis terkait hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya pada masing-masing indikator yaitu kualitas sistem (*system quality*), kualitas informasi (*information quality*), kualitas layanan (*service quality*), intensitas penggunaan (*intention to use*) atau penggunaan (*use*), kepuasan pengguna (*user satisfaction*), serta manfaat bersih (*benefit*).

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, Muhammad Daffa (2022). *Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Kinerja Pelaporan Keuangan BPPKAD Kabupaten Magelang (Metode Penelitian Kualitatif. Teori Pemanfaatan)*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Halim, A., & Muhammad. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai*. UPP STIM YKPN.
- Infantrina, Cintya (2021). *Analisis kesiapan penggunaan aplikasi berbasis online (SIPD) dalam laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Kota Tasik Malaya (Metode Penelitian Kualitatif. Teori Analisis)*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- James, O. (2005). *Introduction to Information System*. McGraw. (IJMRME).
- Jogiyanto. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. ANDL.
- Marja, S., Chatarina, & Afni. (2022). *Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. 2*.
- Pamungkas, Ganjar (2022). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Barat)*. Yogyakarta. Universita Gadjah Mada
- Prameswari, Nadya (2022) *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Perolehan Opini Audit Bpk Tahun 2021 Di Kabupaten Purbalingga*. Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Harahap, M. Zakky. 2021. *Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Untuk Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Jurnal Politik Science Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. PPM.
- Santoso, Wawan Giri (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang*. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS.
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21.7/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

